

POLITISASI AGAMA DALAM RANAH KONFLIK DI INDONESIA (Sebuah Tinjauan Kritis)

Mahatva Yoga Adi Pradana
Marwa Parasmana
Hidayati Fajrin
Muhammad Fiqri Fadilah
Mahatva.pradana@uin-
suka.ac.id
20105040046@student.uin-
suka.ac.id
20105040055@student.uin-
suka.ac.id
Mfiqri522@gmail.com
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Universitas Muhammadiyah
Malang

Abstract

Conflict in the Indonesian state cannot be separated from the influence of politics and religious understanding. The symbolization of religion and politics became part of the conflicts that were often faced. This influence is due to the existence of political forces that deliberately put religion as a tool of movement. Where religion, which is a transcendental form of human beings, becomes very political for the sake of economic interests. Muslim societies are trying to reform the society or the community in which the state survives. In addition, the elite sought to reform the country. This idea tries to interpret the Islamization of Java as an alternative conflict and accommodation between competing identities between Java and Islam. This paper uses a qualitative approach by strengthening literature reviews sourced from existing realities. The results found that the politicization of religion prioritizes its main political aspects and uses religion as a tool to create conflict. This happens because religion is one of the ways to create conflicts both vertically and horizontally. Therefore, in minimizing conflicts, Pancasila ideology is needed as a mediator and conflict resolution.

Keywords: Conflict, Politicization of Religion, Religion, Politics

Abstrak

Konflik di negara Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya pengaruh politik dan paham keagamaan. Simbolisasi agama dan politik menjadi bagian dalam konflik yang sering berhadapan. Pengaruh ini disebabkan oleh adanya kekuatan politik yang dengan sengaja meletakkan agama sebagai sebuah alat pergerakan. Dimana agama yang merupakan wujud transedental manusia menjadi sangat politik demi kepentingan ekonomi. Masyarakat muslim

mencoba mereformasi masyarakat, atau komunitas di mana negara bertahan. Selain itu elit berusaha untuk mereformasi negara. Pemikiran ini mencoba untuk menafsirkan Islamisasi Jawa sebagai suatu alternatif konflik dan akomodasi antara identitas-identitas yang bersaing diantara Jawa dan Islam. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penguatan literature review yang bersumber pada realita yang ada. Hasilnya ditemukan bahwa politisasi agama lebih mengedepankan aspek politik utamanya dan menggunakan agama sebagai alat menciptakan konflik. Hal ini terjadi karena memang agama menjadi salah satu jalan menciptakan konflik baik secara vertikal ataupun horizontal. Oleh karena itu dalam meminimalisir adanya konflik, diperlukan ideologi Pancasila sebagai sebuah penengah serta resolusi konflik.

Kata Kunci: Konflik, Politisasi Agama, Agama, Politik

A. Pendahuluan

Perjuangan untuk memperoleh hak-hak sipil dan politik di Indonesia yang sebagian besar berorientasi Muslim tidak berakar pada proyek-proyek politik dan statis seperti di Timur Tengah.¹ Lebih tepatnya, perjuangan kewarganegaraan tumbuh lebih dari yang berbeda dan kadang-kadang tumpang tindih kolektivitas masyarakat yang berakar pada agama, suku, dan kelas. Selain itu, Tujuan utamanya adalah penolakan terhadap penguasa lama yang menindas dan kolonialisme di segala bentuknya.² Meskipun pasti ada kontradiksi, seperti peran agama dan angkatan bersenjata dalam negara dan politik, serta atas relatif pentingnya pemerintahan pusat versus lokal, pada pertengahan 1950-an itu tampaknya mungkin untuk menggabungkan multikulturalisme dengan sipil yang universal dan setara dan hak politik.³ Banyak orang membangun sendiri, seringkali sangat progresif, organisasi untuk efek ini. Upaya mereka hancur, bagaimanapun, dengan Perang Dingin dan "Demokrasi Terpimpin". Kedua pengurangan hak dan kebebasan, memupuk akumulasi modal primitif, dan memungkinkan program politik. Itu hasilnya adalah politik Soeharto yang lebih keras dari tatanan sentralis-otoriter dan pengembangan ekonomi ekstraktif.⁴

Sementara perjuangan hak-hak sosial, dari anti-kolonial perjuangan dan seterusnya, berfokus pada mengubah lembaga-lembaga ekonomi ekstraktif⁵ dan pada mendukung

¹ Moeslim Abdurrahman, *Islam Sebagai Kritik Sosial* (Erlangga, 2003); Abdul Munir Mul Khan, *Moral Politik Santri: Agama Dan Pembelaan Kaum Tertindas* (Erlangga, 2003).

² John Pieris, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban: Analisis Kritis Aspek Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Keamanan* (Yayasan Obor Indonesia, 2004).

³ Eric Hiarij, *Politik Kewargaan Di Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

⁴ Ariel Heryanto, *Identitas Dan Kenikmatan* (Kepustakaan Populer Gramedia, 2015); Ahmad Syafii Maarif et al., *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita* (Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina, 2010); Sunyoto Usman, Zuly Qodir, and J Hasse, "Radikalisme Agama Di Indonesia," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* (2014).

⁵ Hiarij, *Politik Kewargaan Di Indonesia*.

pendidikan populer,⁶ pemerintahan publik dari kolonial sebelumnya perusahaan, reformasi tanah, undang-undang perburuhan yang layak, dan banyak lagi. Dalam hal kesejahteraan tindakan, swadaya dan dukungan melalui organisasi sosial-keagamaan telah lebih penting daripada program publik.⁷ Ini sekarang berubah, keduanya karena kebutuhan aktor dominan untuk menarik pemilih dan menahan protes di konteks perkembangan neoliberal yang semakin tidak seimbang dan karena banyak kelompok yang berbeda dari tenaga kerja formal hingga informal dan juga kelas menengah dengan pekerjaan tidak tetap mulai menyadari bahwa mereka memiliki lebih banyak keuntungan dari datang bersama-sama untuk reformasi kesejahteraan universal daripada dengan mencoba untuk mendapatkan yang khusus nikmat mereka sendiri. Aliansi yang lebih luas seperti itu juga dapat mendorong keberlanjutan dan pembangunan ekonomi inklusif, jika dikombinasikan dengan sipil dan politik yang lebih baik perwakilan.⁸

Akhirnya adalah perjuangan untuk identitas dan perbedaan. Sejak hari-hari awal, perjuangan ini telah mengambil bentuk nasionalisme dan telah dibentuk oleh perlawanan pengecualian budaya, di satu sisi, dan kontestasi atas makna Indonesia, di sisi lain.⁹ Setelah Kemerdekaan, berbasis etnis dan agama gerakan telah menjadi penantang utama untuk konstruksi dominan dari masyarakat nasional. Baru-baru ini, negara ini juga menyaksikan kebangkitan versi perjuangan identitas yang sedikit berbeda, yang sebagian besar menentang penggunaan suku, agama, dan/atau kelas sosial sebagai dasar untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan menjadi orang Indonesia. Namun, penting untuk dicatat bahwa perjuangan ini bukan untuk demi identitas dan perbedaan. Perjuangan untuk pengakuan budaya selalu telah terjalin erat dengan tuntutan hak-hak sipil, politik, dan sosial.¹⁰

Studi tulisan ini dimulai dengan mengidentifikasi berbagai bentuk aksi kolektif, sebagian besar gerakan sosial, oleh kelompok dan individu yang tertindas dan terpinggirkan yang memperjuangkan klaim kewarganegaraan.¹¹ Beberapa kriteria diadopsi. Pertama, penelitian ini tidak dapat dilakukan tanpa menyelidiki perjuangan kewarganegaraan yang

⁶ Setia Asyanti, "PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI: SUDAH TERLAMBATKAH?" (2012).

⁷ Muhamad Agus Mushodiq and Ali Imron, "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi COVID-19 (Tinjauan Tindakan Sosial Dan Dominasi Kekuasaan Max Weber)," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 5 (2020): 403.

⁸ Fuad Fachruddin, *Agama Dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama* (Pustaka Alvabet, 2006).

⁹ Edward Aspinall and Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, Dan Negara Di Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).

¹⁰ Khoidul Hoir, "Internalisasi Nilai-Nilai Aswaja Al Nahdliyah Dalam Praktek Ideologi Kebangsaan Di Kalangan Pemuda Sampang" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

¹¹ Abdul Khobir and Nur Khasanah, *POTRET DISKRIMINASI PENDIDIKAN: Gerakan Sosial Baru Dan Perlawanan Agama Lokal "Agama Djawa Soenda"* (Penerbit NEM, 2020).

dilakukan oleh komponen-komponen utama gerakan pro-demokrasi di Indonesia saat ini.¹² Ini membahas warisan kesalahan representasi politik negara dengan menghubungkannya dengan pertanyaan dari kesejahteraan sosial. Tidak ada yang lebih menarik dan menantang dari pada mempelajari upaya terbaru gerakan-gerakan ini dalam mengembangkan aliansi yang lebih luas di sekitar isu dan pemimpin tertentu sebagai bagian dari transformasi masalah demokrasi formal dan kewarganegaraan politik yang terbatas.

Kedua adalah kekuatan yang muncul dalam gerakan berbasis populer yang membayar perhatian utama pada pertanyaan keadilan sosial, tetapi juga menggabungkannya dengan pertanyaan tentang pengakuan dan representasi. Kekuatan-kekuatan itu, misalnya, gerakan kaum miskin kota dan pekerja rumah tangga yang baru-baru ini menarik perhatian yang lebih luas dan membentuk perdebatan tentang hak dan kesejahteraan bagi yang terpinggirkan kelompok.¹³

Kelompok ketiga terdiri dari gerakan keadilan lingkungan. Gerakan-gerakan ini merupakan bagian penting dari gerakan pro-demokrasi yang lebih luas di Indonesia pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Mereka tentu saja tetap penting, meskipun sebagian besar tindakan mereka sekarang fokus pada isu-isu tertentu dan mereka semakin terisolasi dari perjuangan lain meskipun ada keprihatinan bersama mengenai klaim kewarganegaraan untuk inklusi budaya, sosial, dan politik. Gerakan keadilan lingkungan di sekitar perkebunan kelapa sawit yang tumbuh cepat dan sektor pertambangan telah dipilih untuk diteliti dalam penelitian ini.¹⁴

Keempat, menarik untuk dicatat bahwa Indonesia telah menyaksikan maraknya gerakan dan studi tentang aksi kolektif berbasis identitas. Gerakan-gerakan ini sering ditangani secara bercabang oleh para sarjana. Di satu sisi, ada pihak-pihak yang mengurung mereka dari bentuk-bentuk politik populer lainnya dan menempatkan mereka sebagai politik budaya yang harus dipahami baik dari segi politik identitas maupun politik perbedaan. Di sisi lain, ada sarjana ilmu politik yang menonjolkan kepentingan material dalam perjuangan rakyat dengan mengorbankan identitas dan politik budaya, kebanyakan memperlakukan gerakan tersebut sebagai kurang signifikan atau sebagai pengalihan politik. Kajian ini bermaksud untuk mengatasi kesenjangan tersebut, yakni mengkaji identitas dan kepentingan material sebagai dua bagian yang saling berhubungan dalam perjuangan kewarganegaraan.

¹² Nur Iman Subono, *Dari Adat Ke Politik: Transformasi Gerakan Sosial Di Amerika Latin* (Marjin Kiri, 2017).

¹³ Hiariej, *Politik Kewargaan Di Indonesia*.

¹⁴ Ibid.; Carles Boix, Susan C Stokes, and Ahmad Asnawi, *Pertikaian Politik Dan Gerakan Sosial: Handbook Perbandingan Politik* (Nusamedia, 2021); Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil* (InsistPress, 1996).

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber dari tinjauan pustaka.¹⁵ Pengumpulan data berupa data-data yang terdapat pada berita secara offline maupun online. Sumber data yang di dapatkan secara langsung melalui pengumpulan media.

C. Pembahasan

Konflik Agama dan Politik di Indonesia

Di Indonesia, kategori agama telah disesuaikan dalam hal agama. Sebuah kata berasal Sansekerta, agama menggabungkan pandangan Kristen tentang apa yang dianggap sebagai agama dunia dengan pemahaman Islam tentang apa yang mendefinisikan agama yang tepat seorang nabi, kitab suci, dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, politik keagamaan Indonesia dapat dicap mengambil ungkapan dari felicitous Sven Cederroth (Cederroth 1996) agamaization, atau lebih umum lagi, religionization, yang menyiratkan bahwa penganut agama asli belum beragama (belum beragama) dan oleh karena itu diharapkan beragama (diagamakan).¹⁶ Dalam hal ini, di Indonesia terutama di Jawa, ada ketegangan yang terus-menerus dan bergeser antara pendukung pandangan dunia lokal dan praktik ritual adat, yang menganggap mereka sebagai cukup mandiri dan pantas diberi label agama,¹⁷ dan pendukung agama translokal asal asing, yang mengklaim universalisme, yang umumnya menyangkal tradisi lokal itu kualifikasi agama. Ketegangan seperti itu memainkan peran utama dalam konstruksi identitas agama Indonesia yang diakui oleh negara.¹⁸

Penyebaran agama-agama dunia pada abad kesembilan belas mengakibatkan malisasi ritus dan prinsip tradisi Asia menjadi sesuatu yang menyerupai sistem kepercayaan dan struktur kelembagaan agama-agama Ibrahim, yang melahirkan entitas-entitas seperti Hinduisme, Buddhisme, Jainisme, Sikhisme, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, dan sebagainya.¹⁹ Para reformator menekankan unsur-unsur rasional dan doktrinal dalam warisan agama mereka, mengutuk takhayul buta, penipuan imam yang ceroboh, dan kebiasaan terbelakang. Dengan mengganti ortodoks dengan ortopraksi, gerakan reformasi ini berusaha membedakan antara agama yang benar dan 'tradisi' belaka. Ketika mereka memperluas jangkauan global mereka, bentuk-bentuk kepercayaan normatif ini membatasi

¹⁵ Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi* (Universitas Brawijaya Press, 2017).

¹⁶ Michel Picard and Rémy Madinier, "The Politics of Religion in Indonesia," *Syncretism, Orthodoxy, and Religious Contention in Java and Bali* (2011): 117.

¹⁷ Febby Nancy Patty, *Membangun Teologi Lokal: Dari Nyanyian Dan Tarian Adat Soa Tunjani Di Oma* (PT Kanisius, 2018).

¹⁸ Khoiro Ummatin Ummatin, "Konflik Dan Integrasi Umat Beragama Dalam Budaya Lokal Di Loka Muksa Sri Aji Joyoboyo Menang Pagu Kediri," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 1, no. 1 (2017): 37–52.

¹⁹ Indriaty Ismail and Muhammad Khairul Anuar Mat Saupi, "Genealogi Agama: Sumbangan HOK Rahmat SH (1928-1993) Dalam Buku 'Dari Adam Hingga Muhammad' (1976)," *Islamiyyat* 42, no. 2 (2020): 35–48.

batas-batas mereka dan memantapkan identitas korporat mereka, sambil berusaha mengendalikan beragam ritual dan perayaan yang mereka temui. Proses religiisasi semacam itu menghasilkan evolusi yang kompleks, ditandai dengan rasionalisasi perumusan korpus kanonik, pelembagaan dan sosialisasi efektifnya²⁰ serta dengan sekularisasi - desakralisasi beton imanen demi abstrak dan transenden.²¹

Muslim mencoba mereformasi masyarakat, atau komunitas; di mana negara bertahan, elit berusaha untuk mereformasi negara. Upaya-upaya reformasi negara atau masyarakat-masyarakat ini merupakan upaya-upaya yang membuahkan hasil yang jauh berbeda. Negara muncul sebagai sarana untuk melestarikan masyarakat Politisasi Islam Budaya Islam dan identitasnya, tetapi juga sebagai instrumen yang digunakan oleh elit sosial dan birokrasi untuk melanggengkan dominasi mereka.²² Kebangkitan individu akan memberikan sudut pandang baru untuk mengevaluasi peran negara dan fungsi iman; modernisme dengan cara tertentu adalah individualisme rasional. Berkembang dan istuime yakin dari Inggris, Prancis, Rusia, dan Italia, pertama-tama menerima serangkaian "reformasi" yang ditandatangani terutama untuk memfasilitasi penerimaan sistem kapitalis dan kemudian untuk memulai pemisahannya sendiri dengan otonomi dan kemerdekaan untuk mata pelajaran Kristen, yang kelas menengah telah berkembang secara substansial. Perjuangan kelas menengah Muslim Otto man (yang menguasai sebagian besar tanah negara dan mengubahnya menjadi milik pribadi) dan non-Muslim (yang menguasai asing dan, pada tingkat yang lebih rendah, perdagangan domestik) akhirnya diselesaikan.²³

Disadari atau tidak, beberapa elit Muslim di tanah pendudukan berkolaborasi dengan kekuatan Eropa, dalam banyak hal sebagai kelompok sosial bawahan, tetapi di lain pihak sebagai masyarakat negara sebagai mitra ekonomi dan perantara budaya. Ketundukan pemimpin tradisional dan baru kepada orde baru dan kemunculan mereka sebagai kelas menengah semikolonial, meskipun modernis, memiliki pandangan rasionalis mengasingkan massa dan memungkinkan munculnya tipe pemimpin populis baru untuk menghadapi tantangan yang diciptakan oleh sistem kapitalis.²⁴

Sebagai sebuah kategori, 'agama' adalah alat pengklasifikasi, pembangunan dan pemeliharaan perbatasan. Dengan demikian, atau Sebagai sebuah kategori, agama adalah

²⁰ Robert W Hefner, "CHAPTER ONE. Introduction: World Building and the Rationality of Conversion," in *Conversion to Christianity* (University of California Press, 1993), 3–44.

²¹ Nur Azuki Yusuff et al., "Perpaduan Berpaksikan Titik Kesamaan Fungsi Pelbagai Agama Dengan Mengambil Islam Sebagai Agama Rasmi Di Malaysia" (2016).

²² Yanwar Pribadi and Zaki Ghufron, "Komodifikasi Islam Dalam Ekonomi Pasar: Studi Tentang Muslim Perkotaan Di Banten," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 15, no. 1 (2019): 82–112; Emna Laisa, "Islam Dan Radikalisme," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2014).

²³ Moeflich Hasbullah, *Islam & Transformasi Masyarakat Nusantara* (Prenada Media, 2017); Iskandar Maskun and Warief Djajanto Basorie, *Mengangkat Masalah Lingkungan Ke Media Massa* (Yayasan Obor Indonesia, 1996).

²⁴ Reni Dian Anggraini, "Analisis Konsep Sekularisasi Ditinjau Dari Perspektif Nurcholish Madjid," *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid* (2022): 147.

alat pengklasifikasi, yang memiliki perhatian pada pekerjaan praktis yang dicapai oleh penggunaan agama sebagai , yaitu, baik apa yang dicakupnya maupun apa yang dikecualikannya.²⁵ Penulis harus menyadari bahwa apa yang dianggap sebagai agama bagi pengamat mungkin tidak sesuai dengan apa yang oleh aktor-aktor lokal itu sendiri dianggap berkaitan dengan agama mereka. Lebih jauh lagi, para aktor lokal ini tidak serta-merta setuju tentang apa agama mereka, karena agama adalah masalah yang diperebutkan, berkaitan dengan nilai-nilai yang dilembagakan dan hubungannya dengan kekuasaan dan legitimasinya. Oleh karena itu, seseorang harus menjelaskan apa yang diidentifikasi dan dilegitimasi sebagai agama, oleh siapa, untuk tujuan apa, dalam keadaan apa dan di bawah kondisi politik yang ada. Dalam perspektif ini, pertanyaan yang relevan bukan lagi tentang agama melainkan tentang apa yang bisa dianggap sebagai agama serta bagaimana komunikasinya.²⁶

Di Indonesia, kategori 'agama telah disesuaikan dengan agama'. Banyak, jika bukan sebagian besar, Indonesianis tampaknya menerima begitu saja bahwa agama hanyalah terjemahan kata demi kata dari agama. Namun, hal-hal tidak begitu mudah, karena agama mencakup bidang semantik yang jauh lebih sempit daripada agama, di mana orang Indonesia harus meminjam kata pinjaman bahasa Belanda religi. Sebenarnya, agama adalah kombinasi aneh dalam kedok Sansekerta dari pandangan Kristen tentang apa yang dianggap sebagai agama dunia dengan pemahaman Islam tentang apa yang mendefinisikan agama yang tepat: wahyu ilahi yang dicatat oleh seorang nabi dalam sebuah kitab suci, sebuah sistem hukum untuk komunitas pemeluk agama, peribadatan berjamaah, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, agama adalah titik pertikaian antara set aktor yang berbeda. Selain itu, jauh dari otonomi, agama merupakan bagian integral dari bidang semantik yang dikandungnya bersama dengan kategori adat (tradisi), budaya ('budaya'). hukum (law), dan berbagai penanda yang melibatkan otoritas politik.

Konflik Politik dan Agama di Jawa

Banyak orang memandang secara akademis untuk bahwa Islam di Jawa sebagai lapisan yang dangkal, yang di bawahnya terdapat warisan sinkretis pribumi dan Hindu-Budha.²⁷ Prasangka ini telah dikecam dari berbagai tempat, dan visi yang lebih seimbang muncul baru-baru ini dengan karya grafis historio Merle Ricklefs. Ia menafsirkan Islamisasi Jawa sebagai suatu alternatif konflik dan akomodasi antara identitas-identitas yang bersaing, Jawa dan Islam, yang mengarah pada 'sintesis mistik', yang pada pergantian abad kesembilan

²⁵ M Taufiq Rahman, *Agama Dan Politik Identitas Dalam Kerangka Sosial* (Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

²⁶ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif* (Mizan Publishing, 2021); Rachmat Kriyantono, *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi Penelitian & Praktik* (Kencana, 2017).

²⁷ Ahmad Choirul Rofiq, *Menelaah Historiografi Nasional Indonesia: Kajian Kritis Terhadap Buku Indonesia Dalam Arus Sejarah* (Deepublish, 2016).

belas menggabungkan komitmen terhadap identitas Islam, pengamatan terhadap lima pilar keyakinan, dan penerimaan kekuatan spiritual lokal, semua dalam konteks tasawuf.²⁸

Fakta bahwa jenis Islam yang dibawa ke Jawa sebagian besar adalah bujukan sufi, yang disampaikan oleh para pedagang India yang sangat kental dengan agama Hindu, agaknya memudahkan transisi dari Hindu-Budha mistik ke Islam mistik. Oleh karena itu, orang mungkin menduga bahwa, pada awalnya, masuknya Islam mungkin tidak menyebabkan gangguan yang berarti dalam kehidupan dan pandangan dunia orang Jawa, yang bagi mereka kepercayaan baru itu mungkin dianggap sebagai sarana untuk menggali sumber mistik lain. Akan tetapi, tidak seperti ide-ide India, Islam memberikan jalan eksklusif menuju keselamatan yang mensyaratkan pengenalan batas-batas agama dan penolakan cara-cara lama, yang berujung pada perubahan status etnis. Dalam kata-kata Anthony Reid, ide-ide kitab suci yang baru kemudian dilihat sebagai "agama" (agama) dan pola lama sebagai "adat" (adat).²⁹

Selama abad kesembilan belas, persaingan ambisi kolonialisme Belanda dan kebangkitan Islam akan menantang sintesis mistik Jawa.³⁰ Sejak saat itu, seseorang mengamati perpecahan yang melebar antara versi Islam sinkretis dan anti-sinkretis, yang dimanifestasikan dalam konflik antara di satu sisi, para peziarah yang kembali dari Mekah (haji), yang ingin menumbuhkan rasa identitas Islam yang lebih bersemangat. Sementara masyarakat Jawa menjadi terpolarisasi, penguasa kolonial berusaha menghalangi penyebaran Islam di Nusantara. Meskipun kewaspadaan mereka, meskipun, Islam memainkan peran utama dalam pembangunan nasionalisme Indonesia. Sudah di abad kesembilan belas, Islam telah menjadi panji bagi pemberontakan antikolonial, memberikan ikatan bersama di antara penduduk asli, berdasarkan kepemilikan mereka dalam komunitas orang percaya sejati (umat), yang menentang mereka dari penguasa Kristen mereka. Dengan munculnya gerakan nasionalis pada abad kedua puluh, polarisasi masyarakat Jawa menjadi abangan dan putihan semakin intensif dan dipolitisasi.

Meskipun demikian, sebagai konsesi kepada kelompok Islam, Kementerian Agama (Kementerian Agama Republik Indonesia, KAGRI, kemudian berganti nama menjadi Departemen Agama) didirikan pada Januari 1946. Awalnya didirikan untuk memajukan kepentingan Muslim, Kementerian Agama Republik Indonesia didirikan pada Januari 1946. Agama berkembang dari mulai memasukkan bagian-bagian terpisah untuk Protestantisme dan Katolik Roma, dengan demikian mengakui Kekristenan sebagai agama yang sah dari

²⁸ Saiful Mujab, "Javanese Abangan World View and Practices in Imogiri Cemetery Yogyakarta," *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial* 2, no. 1 (2018): 13–27; Merle Calvin Ricklefs, *Mengislamkan Jawa* (Serambi Ilmu Semesta, 2013).

²⁹ Ahmad Khoirul Fata, "Pemikiran Dan Peran Politik Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)" (2020); Ali Fahrudin, "Nasionalisme Soekarno Dan Konsep Kebangsaan Mufassir Jawa," *Litbangdiklat Pres* (2020).

³⁰ Ricklefs, *Mengislamkan Jawa*.

Kitab.³¹ Sedangkan Kementerian Agama dikuasai oleh santri muslim yang berusaha memanfaatkannya untuk membawa abangan Jawa agar lebih tegas memeluk agama Islam, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi kubu orang Jawa.

Untuk memahami makna dan makna agama' di Indonesia merdeka, perlu ditelusuri apa yang termasuk - dan apa yang dikecualikan dari status normatif agama. Sementara Konstitusi menjamin kebebasan warga negara Indonesia untuk memeluk dan menjalankan agamanya sendiri, Kementerian Agama berusaha untuk membatasi penerimaan hukum agama-agama yang diakui, sesuai dengan pandangan Islam tentang apa yang memenuhi syarat sebagai agama yang sah - yaitu, sebuah pemahaman agama sebagai eksklusivis, kongregasi, skripturalis dan universalis.

Jika Indonesia saat ini, meskipun merupakan negara Muslim terbesar di dunia, adalah negara agama, tetapi bukan negara Islam, ini terutama disebabkan oleh aliansi historis antara sayap nasionalis (pada dasarnya Muslim) dan perwakilan dari minoritas Kristen Nusantara. Peran yang terakhir dimainkan, antara Mei dan Agustus 1945, selama perdebatan sengit yang mengarah pada definisi ideologi agama bangsa, sekarang didokumentasikan dengan baik. Di beberapa daerah, minoritas Kristen mengancam akan memisahkan diri dari Republik Indonesia yang akan mendeklarasikan negara Islam. Sayap nasionalis dipimpin oleh Sukarno. juga sangat enggan untuk mendasarkan Republik baru secara eksklusif pada Islam, mengambil deklarasi ini sebagai alasan untuk mengesampingkan apa yang disebut Piagam Jakarta pada malam kemerdekaan. Hilangnya' (kehilangan) kompromi ini, yang mengusulkan penerapan syariah bagi penduduk Muslim, membuat kaum nasionalis dan sekutu Kristen mereka mendapat permusuhan abadi dari pihak Islamis.³²

Perjumpaan antara Jawanisme dan Kristen seperti itu menyebar ke berbagai kelompok da'wah Kristen. Adapun Protestan, misionaris Eropa serta orang-orang awam saleh Indo-Eropa dan beberapa pemimpin agama pribumi berkontribusi pada penyebaran agama Kristen dengan cara yang tidak teratur dan sering kompetitif. Dalam kasus umat Katolik, di sisi lain, para Yesuit memainkan peran yang menentukan dalam perkembangan ini. Kembali di Hindia Belanda sejak tahun 1859, Serikat Yesus secara resmi ditugaskan dengan misi. pada tahun 1893. Pada tahun 1896, tiga Yesuit pertama menetap di Jawa Tengah, di pinggiran lingkungan Eropa. Karya salah satunya, Franciscus van Lith. yang menghabiskan 25 tahun (1896-1921) di antara orang Jawa, patut mendapat perhatian khusus, baik karena banyaknya

³¹ Michel Picard, "Balinese Religion in Search of Recognition: From Agama Hindu Bali to Agama Hindu (1945-1965)," *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 167, no. 4 (2011): 482–510.

³² Syahrir Karim, "Post-Islamisme: Akar Teologis, Wacana, Dan Kontestasi Politik" (2022); Waleed El-Ansary et al., *Kata Bersama: Antara Muslim Dan Kristen* (UGM PRESS, 2019).

dokumentasi yang ditinggalkannya maupun untuk peran penting yang dikaitkan dengannya oleh ingatan Katolik Indonesia.³³

Jawa dipandang sebagai sistem dominasi yang memadukan keragaman dalam bahasa Jawa dengan cetakan, budaya integratif Jawa untuk sementara ditata ulang sebagai sistem yang lebih lembut yang mengakui dan menerima pluralisme tanpa berusaha mencairkan komponen-komponennya. Jawa bahkan tempat mbolik sebagai budaya korban, atau setidaknya tertindas Jawa bahkan 'desentralisasi dan dipindahkan dari statusnya sebagai budaya berbasis pusat ke sandera baru Islamisme atau keanehan sewenang-wenang Jakarta. Jawa hampir menjadi pinggiran dan dengan demikian adil, saat otonomi daerah. Dalam kehidupan yang berdasarkan koeksistensi religius pasifik, orang Jawa diidealkan sebagai perdamaian, cara percampuran yang menghubungkan berbagai kepercayaan, ritual, dan nilai. Sinkretisme adalah sumber kenikmatan dan kebanggaan yang berasal dari perasaan senang bercampur dan bercampurnya berbagai corak, warna, dewa, orang suci yang bahagia, pakaian, cara. Sebuah preferensi ditegaskan kembali dalam mendukung tradisi, adat (adat), dan ritual. Menjadi orang Jawa sekarang diasosiasikan dengan menjadi berbeda dan menikmati perbedaan orang lain; akibatnya, karena Jawa terus menjadi intisari Indonesia, menjadi orang Indonesia berarti mampu menjadi berbeda dan tetap bersama.³⁴

Rekayasa ulang budaya Jawa ini memungkinkan pernisan Pancasila dengan versi terbaru dari Javanisme: dari formula satu yang otoriter, seperti Suharto, sentralistik dan feodal. Sultan yang pluralis. The Yogyakarta sendiri, untuk menyebut seorang pembawa penting Jawa tradisional serta Jawa serta (alm). nvert ke Reformasi, merasa berhak untuk melambangkan pembacaan baru orang Jawa ini mengkonversi ne seks dari merajut kembali keindonesiaan kita', accorism. Dia berbicara 'Merajut Kembali. Keindonesiaan nya hal-hal bahasa Jawa, dengan judul menurut Kita). Meniru Hamengku Buwono X bermaksud mereformasi Indonesia, dengan menyerahkan diri pada proses pemilu 2009; terlepas dari status monarkinya, ia siap menjadi kepala negara terpilih. Namun, membayangkan kembali Jawanisme mungkin tidak cocok untuk semua orang, karena Jawa masih dipandang sebagai pusat yang mendominasi di Indonesia, setidaknya bagi penduduk pulau terluar yang masih tidak mempercayai imperialisme Majapahitisme Jawa.³⁵

Di luar reinterpretasi kejawaan, Pancasila membutuhkan beberapa gloss dan didaktisisme untuk mengembalikan legitimasi dan potensinya sebagai sumber pluralisme.

³³ Ewi Herliana, "SLAMETAN SEBAGAI POROS BUDAYA KEJAWEN DI DALAM KITAB PRIMBON BETALJEMUR ADAMMAKNA KARYA PANGERAN HARYA TJAKRANINGRAT (Analisis Dalam Tinjauan Aqidah Islam)" (UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2016); El-Ansary et al., *Kata Bersama: Antara Muslim Dan Kristen*.

³⁴ Veza Aditya Lenggawa, "Strategi Jawa Pos Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Media Di Era Revolusi Industri 4.0," *Konvergensi: jurnal ilmiah ilmu komunikasi* 1, no. 1 (2019): 19–38; Denys Lombard, *Nusa Jawa: Batas-Batas Pembaratan*, vol. 1 (PT Gramedia Pustaka Utama, 1996).

³⁵ Kevin Bramantya Azis, "KIPRAH KEPEMIMPINAN SULTAN HAMENGGU BUWONO X DALAM REFLEKSI SEWINDU KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA," *Journal of Politic and Government Studies* 11, no. 3 (2022): 296–310.

Kita perlu Pancasila untuk mengingatkan kita bahwa manusia tidak abadi', kata wartawan Goenawan Mohammad di simposium Depok. Pancasila tetap penting selama masa demokrasi karena mewakili semua kepentingan etnis dan agama yang beragam di negara ini. Ini adalah tujuan yang dinamis dan juga ideal. "Pancasila mewakili cakrawala bangsa. Kami tidak pernah mencapainya tetapi kami selalu mencapainya." dalam proses untuk membantu memfasilitasi penerimaan baru dari lima prinsip, alasan mengapa itu didiskreditkan dan hampir ditinggalkan dieksplorasi oleh para promotor barunya. Dua faktor yang biasanya ditekankan: prinsip-prinsip yang disalahgunakan oleh Suharto; dan ketidakberdayaan negara di bawah Reformasi telah membuka jalan menuju syariah.

Bentuk dan prospek negara Indonesia dan hubungannya dengan agama masih dipertanyakan: apakah Indonesia negara sekuler atau agama? Apapun jawabannya, terikat kemana? Lebih dari sebelumnya, pandangannya saling bertentangan. Menurut norma republik, setiap orang diharapkan untuk memeluk salah satu agama yang diakui, yang berarti bahwa Indonesia adalah semacam negara agama, di mana kewarganegaraan tergantung pada kepatuhan pada agama yang disepakati secara resmi. , meski tanpa dasar hukum yang jelas, Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi membedakan antara agama yang diakui dan tidak diakui.

Meskipun ada konsensus tentang kata-kata Pancasila, tidak ada kesamaan pemahaman tentang bagaimana itu harus ditafsirkan. Indonesia dianggap oleh sebagian besar orang Indonesia sebagai 'bukan sekuler maupun Islami', yang menimbulkan banyak kesalahpahaman: non-Muslim mengklaim bahwa di bawah Pancasila mereka memiliki kebebasan beribadah, sementara banyak Muslim berpandangan bahwa hukum Islam harus menjadi sumber hukum nasional. Untuk mengurangi potensi disintegrasi bangsa. Bertolak dari kontradiksi ini, perwakilan dari setiap agama yang diakui telah melakukan dialog antaragama yang dimaksudkan untuk menumbuhkan saling pengertian, toleransi dan persaudaraan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai dasar Pancasila dan meningkatkan pluralisme. Apakah dialog meredakan persaingan agama atau tidak, semacam sekularisme implisit dengan menyelaraskan sisi agama mungkin menghasilkan sisi yang baik, seperti beberapa kelompok penekan agama yang harus menerima aturan main yang sama. Dalam pemulihan hubungan yang dibatasi ini, beberapa transendensi hilang demi kepentingan relativisme.

Kerangka negara Pancasila kemudian mempersulit Islam untuk diperlakukan secara khusus, sementara itu cenderung melihat dirinya sebagai agama yang luar biasa, baik dimaksudkan untuk mendominasi tetapi juga rentan untuk didominasi oleh aliran-aliran lain yang terorganisir.³⁶ Nasib sensitif Islam di Indonesia inilah yang mendorong para Islamis mendesak untuk mencari beberapa bentuk negara Islam, termasuk dengan mengislamkan Pancasila. Melalui arogansi dan eksekunya, Islam radikal membangkitkan tuntutan Islam

³⁶ Aspinall and Berenschot, *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, Dan Negara Di Indonesia*.

'spiritual' yang lebih lembut, terlihat lebih asli atau lebih cocok dengan lokal budaya. Penganut Islam politik percaya bahwa mereka memiliki solusi untuk segalanya. Spiritual Islam tahu bahwa ini tidak benar. Ekspresi Islam politik umumnya dibayangkan sebagai hukuman gantung, rajam, pemenggalan kepala, amputasi dan cambuk para penjahat yang dihukum. Islam Spiritual mengekspresikan dirinya dalam kasih sayang, belas kasihan dan keadilan dari pada hukuman."

D. Penutup

Tahun politik Indonesia tidak dipungkiri diwarnai dengan politisasi agama. Sampai sekarang, agama masih menjadi sesuatu yang selalu bersentuhan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, yang salah satunya adalah politik. Karena itu pula, agama seringkali dijadikan sebagai "dagangan" politik, utamanya ketika menjelang praktek keagamaan di Indonesia baik pada pulau Jawa maupun diluar pulau Jawa yang tujuan akhirnya adalah untuk meraih kepentingan relativisme. Banyak gerakan yang telah melakukan politisasi agama berbasis wacana-wacana yang populis dengan argumentasi informasi-informasi yang menghidupkan daya legitimasi agama dalam rangka kepentingan politik. Realitas politik pasca-kebenaran menjadi ancaman bagi sistem demokrasi di Indonesia. Sudah saatnya berbagai pihak, baik dari pemerintah sampai ke masyarakat sipil dan akar rumput meningkatkan daya kritis terhadap isu-isu populis dan gejala politisasi agama agar iklim demokrasi Indonesia ke depan dapat terjaga dalam kondisi yang baik.

Politisasi agama mulai populer di Indonesia saat Indonesia merdeka dan saat ingin merumuskan dasar-dasar politik pemerintahan dan kenegaraan. Pada tahun 1950 ini mulai terbentuk berbagai macam partai politik dan ini membuat politisasi agama semakin gila dan ekstrim. Politisasi agama sebenarnya boleh saja ada asal dilaksanakan dengan wajar dan tidak secara berlebihan. Agama juga boleh saja dipolitisir untuk kepentingan dalam keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan yang sempit atau individu atau bahkan kelompok tertentu. Politisasi agama juga boleh saja dilakukan untuk merawat semangat persaudaraan antar umat, cita-cita kebangsaan, dan nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Moeslim. *Islam Sebagai Kritik Sosial*. Erlangga, 2003.

Anggraini, Reni Dian. "Analisis Konsep Sekularisasi Ditinjau Dari Perspektif Nurcholish Madjid." *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid* (2022): 147.

Aspinall, Edward, and Ward Berenschot. *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme,*

- Dan Negara Di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Asyanti, Setia. "PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI: SUDAH TERLAMBATKAH?" (2012).
- Azis, Kevin Bramantya. "KIPRAH KEPEMIMPINAN SULTAN HAMENGKU BUWONO X DALAM REFLEKSI SEWINDU KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA." *Journal of Politic and Government Studies* 11, no. 3 (2022): 296–310.
- Boix, Carles, Susan C Stokes, and Ahmad Asnawi. *Pertikaian Politik Dan Gerakan Sosial: Handbook Perbandingan Politik*. Nusamedia, 2021.
- El-Ansary, Waleed, David K Linnan, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Paripurna P Sugarda, and Harkristuti Harkrisnowo. *Kata Bersama: Antara Muslim Dan Kristen*. UGM PRESS, 2019.
- Fachruddin, Fuad. *Agama Dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama*. Pustaka Alvabet, 2006.
- Fahrudin, Ali. "Nasionalisme Soekarno Dan Konsep Kebangsaan Mufassir Jawa." *Litbangdiklat Pres* (2020).
- Fakih, Mansour. *Masyarakat Sipil*. InsistPress, 1996.
- Fata, Ahmad Khoirul. "Pemikiran Dan Peran Politik Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)" (2020).
- Hasbullah, Moeflich. *Islam & Transformasi Masyarakat Nusantara*. Prenada Media, 2017.
- Hefner, Robert W. "CHAPTER ONE. Introduction: World Building and the Rationality of Conversion." In *Conversion to Christianity*, 3–44. University of California Press, 1993.
- Herliana, Ewi. "SLAMETAN SEBAGAI POROS BUDAYA KEJAWEN DI DALAM KITAB PRIMBON BETALJEMUR ADAMMAKNA KARYA PANGERAN HARYA TJAKRANINGRAT (Analisis Dalam Tinjauan Aqidah Islam)." UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2016.
- Heryanto, Ariel. *Identitas Dan Kenikmatan*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2015.
- Hiariej, Eric. *Politik Kewargaan Di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Hoir, Khoidul. "Internalisasi Nilai-Nilai Aswaja Al Nahdliyah Dalam Praktek Ideologi Kebangsaan Di Kalangan Pemuda Sampang." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Ismail, Indriaty, and Muhammad Khairul Anuar Mat Saupi. "Genealogi Agama: Sumbangan HOK Rahmat SH (1928-1993) Dalam Buku'Dari Adam Hingga Muhammad'(1976)."

- Islamiyyat* 42, no. 2 (2020): 35–48.
- Karim, Syahrir. “Post-Islamisme: Akar Teologis, Wacana, Dan Kontestasi Politik” (2022).
- Khobir, Abdul, and Nur Khasanah. *POTRET DISKRIMINASI PENDIDIKAN: Gerakan Sosial Baru Dan Perlawanan Agama Lokal “Agama Djawa Soenda.”* Penerbit NEM, 2020.
- Kriyantono, Rachmat. *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi Penelitian & Praktik.* Kencana, 2017.
- Laisa, Emna. “Islam Dan Radikalisme.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2014).
- Lenggawa, Veza Aditya. “Strategi Jawa Pos Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Media Di Era Revolusi Industri 4.0.” *Konvergensi: jurnal ilmiah ilmu komunikasi* 1, no. 1 (2019): 19–38.
- Lombard, Denys. *Nusa Jawa: Batas-Batas Pembaratan.* Vol. 1. PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Maarif, Ahmad Syafii, Ahmad Syafii Maarif, Ihsan Ali-Fauzi, and Syamsu Rizal Panggabean. *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita.* Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina, 2010.
- Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi.* Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Maskun, Iskandar, and Warief Djajanto Basorie. *Mengangkat Masalah Lingkungan Ke Media Massa.* Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Mujab, Saiful. “Javanese Abangan World View and Practices in Imogiri Cemetery Yogyakarta.” *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial* 2, no. 1 (2018): 13–27.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Moral Politik Santri: Agama Dan Pembelaan Kaum Tertindas.* Erlangga, 2003.
- Mushodiq, Muhamad Agus, and Ali Imron. “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi COVID-19 (Tinjauan Tindakan Sosial Dan Dominasi Kekuasaan Max Weber).” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 5 (2020): 403.
- Patty, Febby Nancy. *Membangun Teologi Lokal: Dari Nyanyian Dan Tarian Adat Soa Tunj Di Oma.* PT Kanisius, 2018.
- Picard, Michel. “Balinese Religion in Search of Recognition: From Agama Hindu Bali to Agama

- Hindu (1945-1965)." *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 167, no. 4 (2011): 482–510.
- Picard, Michel, and Rémy Madinier. "The Politics of Religion in Indonesia." *Syncretism, Orthodoxy, and Religious Contention in Java and Bali* (2011): 117.
- Pieris, John. *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban: Analisis Kritis Aspek Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Keamanan*. Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Pribadi, Yanwar, and Zaki Ghufron. "Komodifikasi Islam Dalam Ekonomi Pasar: Studi Tentang Muslim Perkotaan Di Banten." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 15, no. 1 (2019): 82–112.
- Rahman, M Taufiq. *Agama Dan Politik Identitas Dalam Kerangka Sosial*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Islam Alternatif*. Mizan Publishing, 2021.
- Ricklefs, Merle Calvin. *Mengislamkan Jawa*. Serambi Ilmu Semesta, 2013.
- Rofiq, Ahmad Choirul. *Menelaah Historiografi Nasional Indonesia: Kajian Kritis Terhadap Buku Indonesia Dalam Arus Sejarah*. Deepublish, 2016.
- Subono, Nur Iman. *Dari Adat Ke Politik: Transformasi Gerakan Sosial Di Amerika Latin*. Marjin Kiri, 2017.
- Ummatin, Khoiro Ummatin. "Konflik Dan Integrasi Umat Beragama Dalam Budaya Lokal Di Loka Muksa Sri Aji Joyoboyo Menang Pagu Kediri." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 1, no. 1 (2017): 37–52.
- Usman, Sunyoto, Zuly Qodir, and J Hasse. "Radikalisme Agama Di Indonesia." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* (2014).
- Yusuff, Nur Azuki, Tan Hong Cheng, Kevin Fernandez, and Yohan Kurniawan. "Perpaduan Berpaksikan Titik Kesamaan Fungsi Pelbagai Agama Dengan Mengambilkira Islam Sebagai Agama Rasmi Di Malaysia" (2016).